

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN
PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA
TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Kadek Diah Karuni, NIM 2114101002

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng dan implikasi hukum terhadap proses penyidikan dan pembuktian jika suatu perkara kematian di Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan hasil autopsi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng, Polsek Seririt, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *non-probability sampling*, sementara subjeknya ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam melaksanakan kewenangan mengajukan permintaan autopsi, penyidik tidak melaksanakannya secara mutlak karena terdapat hal-hal yang dipertimbangkan seperti rasa kemanusiaan, kondisi psikologis dan emosional keluarga, serta stabilitas sosial sehingga penyidik mengalami dilema etis dan menerima penolakan autopsi dengan menggunakan alat bukti lain untuk melanjutkan kasus. (2) Implikasi hukum jika suatu perkara kematian akibat tindak pidana tidak dilengkapi hasil autopsi pada proses penyidikan adalah kasus akan sulit untuk maju ke persidangan, dan pada proses pembuktian menjadi celah bagi penasehat hukum untuk melemahkan dakwaan penuntut umum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dan meringankan hukuman bagi terdakwa.

Kata kunci : Implementasi, kewenangan penyidik, autopsi, penolakan autopsi.

**IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIVE AUTHORITY IN SUBMITTING
AUTOPSI REQUESTS IN DEATH CASES SUSPECTED OF CRIMINAL
ACTS IN BULELENG DISTRICT**

By

Kadek Diah Karuni, NIM 2114101002

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of investigators' authority in submitting requests for autopsies in death cases suspected of being criminal acts in Buleleng Regency and the legal implications for the investigation and proof process if a death case in Buleleng Regency is not accompanied by autopsy results. This research is included in the type of empirical legal research and is descriptive in nature. The location of this research was carried out at the Buleleng Police, Seririt Police, and the Buleleng District Prosecutor's Office. The data in this research was collected through document study, observation and interviews. Sample selection was carried out using a non-probability sampling method, while the subjects were determined using a purposive sampling technique. The data obtained was analyzed qualitatively. The research results show that (1) In exercising the authority to request an autopsy, the investigator does not carry it out absolutely because there are things to consider such as humanity, the psychological and emotional condition of the family so that the investigator experiences an ethical dilemma and accepts the rejection of the autopsy by using other evidence. to continue the case. (2) The legal implications if a case of death resulting from a criminal act is not accompanied by autopsy results in the investigation process is that the case will be difficult to progress to trial, and in the evidentiary process it becomes an opening for legal advisors to weaken the public prosecutor's accusations which can influence the judge's confidence and reduce the sentence. for the defendant.

Keywords: *Implementation, investigator's authority, autopsy, refusal of autopsy.*